

UPAYA PERBAIKAN KUALITAS BAHAN OLAH KARET RAKYAT

Husni Malian¹⁾ dan Aman Djauhari²⁾

ABSTRACT

Nowadays, free trade mechanism will be continuously implemented. Regarding those conditions, the increasing export of manufacture rubber commodities can be reached, only if they have a comparative and a competitive advantage than other exporting countries. These efforts must begin with the improvement quality of rubber raw materials at farm level by removing five main inhibiting factors such as: (1) farmer's group doesn't play a role as a business unit; (2) the demand of quality materials of crumb rubber industry is very low; (3) the dominance of traders in the marketing of raw rubber materials; (4) there is no advantageous partnership pattern, and, (5) the mechanism of attractive differential price for better quality not available for unsmoked sheet and slice slab.

Key word: free trade, rubber

ABSTRAK

Dalam era perdagangan bebas yang akan terus bergulir, peningkatan ekspor produk karet olahan hanya dapat ditempuh bila memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dari negara pesaing. Upaya ke arah itu harus dimulai dari perbaikan kualitas bakar di tingkat petani, dengan menghilangkan lima faktor penghambat utama yaitu: (1) Belum berperannya kelompok tani sebagai unit bisnis; (2) Permintaan bahan baku industri karet remah yang masih berorientasi kepada bakar berkualitas rendah; (3) Dominasi pedagang dalam pemasaran bakar; dan (4) Belum adanya pola kemitraan yang saling menguntungkan. (5) Belum terlaksananya penentuan harga sesuai kualitas yang menarik bagi produk sit angin dan slab giling.

Kata kunci: perdagangan bebas, karet

PENDAHULUAN

Bahan olah karet rakyat (bakar) merupakan bahan baku industri karet remah (*crumb rubber*). Secara historis, industri ini semula berlokasi di Singapura dengan teknologi pengolahan yang mampu mengolah bahan baku karet berkualitas rendah. Hilangnya nilai tambah industri keluar negeri telah mendorong pemerintah melakukan larangan ekspor karet berkualitas rendah, sehingga industri karet di Indonesia mulai berkembang. Sejak itu seluruh bakar yang dihasilkan bermuara ke pabrik karet remah, sedangkan jenis bakar di tingkat petani hanya berupa slab.

Teknologi yang dirancang untuk industri karet remah memang ditujukan untuk mengolah bakar berkualitas rendah. Dalam rangkaian mesin yang digunakan terdapat satu alat yang disebut *hammer mill* yang berfungsi untuk menghancurkan, mencincang dan

memilah kotoran pada bakar. Dalam kondisi demikian, permintaan bakar untuk industri bukan berupa sit (baik angin atau asap) dan slab giling, tetapi slab tebal yang digumpalkan dengan asam semut. Sementara itu, untuk ekspor sit angin atau asap sampai saat ini belum banyak dilakukan, karena produk yang dihasilkan petani masih sedikit. Sampai sejauh ini, produk olahan utama dari industri karet remah di Indonesia berupa SIR (*Standard Indonesian Rubber*) - 20.

Untuk menghadapi era perdagangan bebas pemerintah berupaya menghilangkan jenis SIR berkualitas rendah sesuai dengan permintaan konsumen. Hal ini perlu ditempuh di tengah makin tingginya persaingan antarnegara produsen karet alam, serta tingginya tuntutan konsumen akan kualitas produk yang konsisten dan bebas kontaminasi (Nancy, 1997). Untuk alasan tersebut, pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah mengubah skema SIR menjadi SIR - 88. Pada tingkat petani, perubahan tersebut ditujukan

1) Ahli Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

2) Ahli Peneliti Muda pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

untuk meningkatkan pendapatan petani karet melalui perbaikan kualitas bokar.

Tulisan ini diarahkan untuk meninjau kembali upaya yang dapat dilakukan bagi peningkatan kualitas bahan baku karet rakyat, sehingga sasaran ekspor dan peningkatan pendapatan petani karet dapat direalisasikan.

PERANAN KARET RAKYAT

Karet rakyat memiliki empat peranan penting bagi perekonomian Indonesia, yaitu : (1) Sumber pendapatan dan lapangan kerja penduduk; (2) Sumber devisa negara; (3) Mendorong tumbuhnya agro-industri di bidang perkebunan; dan (4) Pelestarian lingkungan. Sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi lebih dari 10 juta penduduk, areal tanaman dan produksi karet rakyat pada tahun 1996 berturut-turut mencapai 84,53 persen dan 77,89 persen dari total tanaman karet di Indonesia. Total areal tanaman karet Indonesia pada tahun itu adalah 3,480 juta ha dengan produksi sebesar 1,513 juta metrik ton. Selama periode 1986 - 1996 luas tanaman karet rakyat meningkat dengan laju 2,21 persen, sedangkan laju produksi mencapai 4,46 persen (BPS, 1997). Lebih besarnya laju kenaikan produksi yang mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan laju kenaikan luas tanaman, menunjukkan adanya kenaikan produktivitas tanaman. Hal ini datang dari peremajaan dengan penanaman klon unggul atau penyadapan lebih intensif di luar bidang sadap. Sementara itu laju kenaikan luas tanaman dan produksi tersebut juga lebih besar dibandingkan dengan 25 tahun periode Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Pertama masing-masing sebesar 1,90 persen dan 2,70 persen (Nancy, 1997).

Gambaran cerah di atas agak berbeda, bila di lihat dari struktur pertanaman karet rakyat di tingkat petani. Lebih dari 70 persen perkebunan karet rakyat saat ini merupakan hutan karet tradisional, yang dicirikan oleh produktivitas dan kualitas bokar yang rendah. Dalam tahun 1995 produktivitas karet rakyat hanya 403 kg Kadar Karet Kering (KKK) per ha, sedangkan Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta berturut-turut sebesar 805 kg KKK dan 618 kg KKK per hektar (Ditjen Perkebunan, 1996). Hal ini tampaknya akan tetap menjadi masalah bagi masa depan perkaretan di Indonesia, termasuk perbaikan kualitas bokar, kecuali pemerintah kembali mengembangkan program peremajaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas.

Sebagai sumber devisa, sekitar 85 persen hasil karet olahan Indonesia diperdagangkan di pasar dunia. Saat ini Indonesia menjadi produsen karet terbesar kedua di dunia, dengan laju volume dan nilai ekspor selama 1986 - 1996 meningkat masing-masing sebesar 4,30 persen dan 12,89 persen (BPS, 1997). Lebih besarnya laju kenaikan nilai ekspor dibandingkan dengan volume ekspor mencerminkan adanya peningkatan harga karet di pasar internasional. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Limbong (1994) yang menemukan, bahwa perilaku penawaran karet alam Indonesia antara lain dipengaruhi oleh GNP (*Gross National Product*) Amerika Serikat dan Jepang yang terus meningkat. Tiga negara tujuan ekspor utama pada 1996 adalah Amerika Serikat (44,18%), Singapura (8,85%) dan Jepang (7,34%) (BPS, 1997).

Peningkatan harga karet di pasar dunia memberikan harapan yang lebih baik bagi petani dan industri karet remah di Indonesia. Apalagi sejak terjadinya depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika yang mencapai lebih dari 100 persen, harga bokar di tingkat petani turut meningkat.

Prospek perkembangan industri perkaretan, khususnya karet remah di Indonesia cukup baik. Sampai tahun 2005 ekspor karet alam dunia diperkirakan meningkat dengan laju 2,6 persen, sedangkan produksi juga meningkat 2,7 persen (World Bank, 1992). Peningkatan ini diharapkan mampu dipenuhi oleh Indonesia, karena pada periode yang sama produksi karet Indonesia meningkat dengan laju 3,5 persen dibandingkan dengan Malaysia yang hanya sebesar 2,4 persen dan Thailand 1,3 persen. Peluang ke arah ini terlihat makin terbuka, setelah Malaysia banyak mengkonversi tanaman karetinya dengan kelapa sawit.

Dari aspek keseimbangan lingkungan, keberadaan hutan karet berperan dalam pelestarian lingkungan. Pola perladangan berpindah (*shifting cultivation*) yang telah sejak lama berkembang di Sumatera dan Kalimantan, umumnya ditanami dengan karet. Kondisi ini dimulai pada pertengahan abad ke 17, dimana biji karet yang mereka terima dari para pedagang ditanam secara asal sebelum perladangan itu ditinggalkan. Hutan karet ini selanjutnya akan tumbuh secara alami dan tidak beraturan, sehingga secara ekologis ikut berperan dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan dari bekas perladangan berpindah. Menurut Dove (1988), masyarakat suku Kantu di Kalimantan Barat telah menjadikan karet sebagai komoditas yang memberikan sumber pemasukan uang. Setiap kebun karet berisi antara 100 - 300 pohon, dengan luas berkisar

antara 0,25 - 0,75 ha. Dengan populasi tanaman seperti itu, fungsi karet dalam pelestarian lingkungan dapat berperan dengan baik.

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BOKAR

Teknologi Pengolahan

Pada sebagian besar daerah pusat produksi karet rakyat, bokar yang dihasilkan petani masih didominasi oleh jenis slab tebal dan ojol dengan karakteristik produk yang berbeda antardaerah. Di propinsi Sumatera Selatan dan Jambi, misalnya, jenis bokar yang dihasilkan petani umumnya adalah jenis slab tebal. Jenis bokar ini merupakan hasil penggumpalan lateks yang dipanen dan dibekukan setiap hari. Kadar karet kering jenis ini umumnya berkisar antara 45 – 52 persen. Berbeda dengan jenis slab di Sumatera Selatan, jenis ojol yang dihasilkan di Riau dan Kalimantan Tengah merupakan penggumpalan lump mangkok yaitu bekuan lateks yang dibiarkan 3 - 4 hari di setiap mangkok pada setiap batang. Sebagai informasi, kadar karet kering pada jenis ojol dapat mencapai 50 – 55 persen.

Sebelum tahun 1969, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor sit asap dan beberapa produk karet lainnya seperti *blanket* dan *crepe*. Kedua jenis produk tersebut banyak dihasilkan langsung oleh para petani, walaupun dengan tingkat mutu yang rendah. Untuk memperbaiki kualitas sit angin yang dihasilkan, pada tahun 1970-an pemerintah juga pernah melaksanakan suatu proyek yang dikenal dengan sebutan *Group Coagulating Centre* pada berbagai daerah pusat produksi karet rakyat, terutama di Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat. Proyek ini juga mengintroduksi program pengolahan bersama dengan penggunaan alat gilingan tangan (*hand mangel*). Namun demikian, sejak dikembangkannya teknologi karet remah secara nasional, berangsur-angsur bahan olah di tingkat petani beralih dari jenis sit menjadi slab dan ojol.

Dalam tahun 1993, dengan pertimbangan daya saing produk di pasar internasional, pemerintah melalui Proyek Pengembangan Unit Pengolahan Karet Rakyat (PUPKR) kembali mengintroduksi unit pengolahan hasil (UPH) kepada petani di enam propinsi. Teknologi yang diintroduksi melalui UPH ini pada dasarnya tidak berbeda dengan proyek perbaikan kualitas bokar yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Dengan demikian, teknologi yang diterapkan melalui proyek

PUPKR ini pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Jika para petani ternyata tidak aktif terlibat dalam proyek atau lebih tepatnya tidak bersedia membuat bokar jenis sit, bukanlah disebabkan belum dikuasainya teknologi yang diintroduksi tetapi oleh faktor lain berupa pertimbangan sosial dan ekonomi. Para petani sebenarnya juga telah mengerti bahwa bokar jenis sit mempunyai mutu yang lebih tinggi dilihat dari segi kemurnian lateks, kebersihan dan kadar karetinya. Namun, perubahan aplikasi teknologi itu juga akan mempengaruhi faktor sosial-ekonomi lainnya, termasuk yang berkaitan langsung dengan tingkat pendapatan petani.

Pemasaran dan Dominasi Pedagang Perantara

Rantai pemasaran karet rakyat dapat dibedakan berdasarkan asal bokar yaitu bokar asal kelompok tani dan bokar yang langsung dijual oleh petani. Rantai pemasaran bokar dari kelompok tani terlihat lebih pendek dibandingkan dengan bokar yang dijual langsung oleh petani. Hal ini dapat terjadi berkat adanya kemitraan yang menghubungkan langsung antara kelompok tani dengan pabrik karet remah. Jenis bokar yang disalurkan melalui rantai tataniaga ini sebagian besar masih berupa slab tebal ataupun ojol, sedangkan bokar jenis sit hanya dihasilkan oleh sebagian kecil anggota kelompok tani. Program kemitraan sebenarnya merupakan langkah awal untuk memotivasi petani agar bersedia melakukan pemasaran bersama. Untuk itu diperlukan sikap, perilaku, visi dan keterampilan kewirausahaan bagi pengurus yang mengelola kelompok tani. Dengan penerapan kemitraan ini, kelompok tani diharapkan mampu memutus rantai tataniaga yang didominasi oleh pedagang. Sampai sejauh ini langkah tersebut belum berjalan optimal, karena hanya sedikit kelompok tani yang mampu melakukan pemasaran bersama. Dalam kemitraan ini kelompok tani diharapkan mampu bersaing dengan para pedagang, khususnya dalam menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

Sebagai contoh di propinsi Jambi terdapat pasar lelang karet, meskipun volume pelelangannya masih sangat terbatas. Para petani umumnya tidak bersedia menjual karet melalui pasar lelang mengingat tidak terjadi kompetisi antar pembeli, sehingga harga karet petani tetap rendah. Sebaliknya, pembeli (pabrik karet remah) tidak tertarik untuk membeli melalui pasar lelang karena jumlah karet yang dilelang terlalu sedikit. Sementara itu, kurangnya pembeli (terutama pabrik) telah mendorong pedagang untuk ikut membeli getah

dari pasar lelang. Keterlibatan pedagang ini menyebabkan petani tidak mendapatkan harga yang layak.

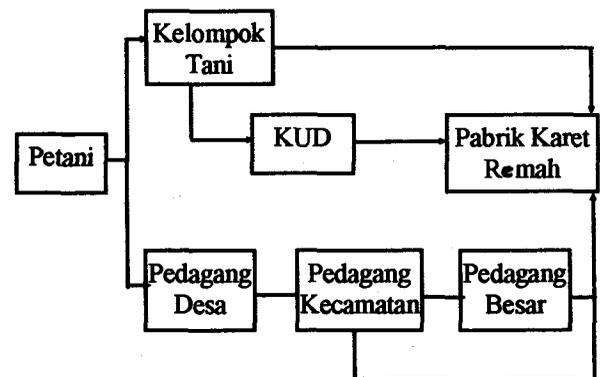
Terlepas dari permasalahan tersebut faktor kunci terletak pada KUD sebagai pelaksana pasar lelang yang tidak mampu meningkatkan volume karet yang dilelang, karena berbagai permasalahan struktural yang terdapat pada tubuh organisasi. Ketidakberdayaan KUD ini terlihat pula dari hasil penelitian Sumana (1992). Dikatakan bahwa sekalipun pola PIR dapat memendekkan rantai tataniaga, tetapi dengan biaya pemasaran yang tinggi telah menyebabkan rantai tataniaga petani PIR kurang kompetitif dalam memberikan harga kepada petani. Sebaliknya, meskipun rantai tataniaga petani non PIR lebih panjang, namun dengan biaya pemasaran yang rendah, maka rantai tataniaga ini bisa lebih kompetitif. Hal ini memberikan pelajaran terhadap akan perlunya pembinaan KUD dalam kegiatan pemasaran bokr.

Untuk jalur bokr yang langsung dijual oleh petani, rantai pemasarannya cukup panjang. Bokr asal petani yang dihasilkan seluruhnya berupa slab tebal atau ojol, sehingga jalur ini merupakan rantai tataniaga tradisional dengan ciri adanya dominasi pedagang perantara. Untuk mencapai pabrik karet remah, bokr dari petani harus melalui beberapa lembaga pemasaran yaitu pedagang desa dan pedagang besar yang berkedudukan di ibukota kecamatan atau kabupaten (Gambar 1). Khusus untuk Propinsi Jambi, terdapat sejumlah agen pemasaran karet di kota Jambi yang disebut "*Kauw Puik*", yaitu agen komisi yang berfungsi sebagai penampung produksi karet dari pedagang besar sebelum dijual atau didistribusikan kepada pabrik karet remah. *Kauw Puik* ini sebenarnya merupakan pedagang perantara yang menghubungkan pedagang besar dengan pabrik karet remah. Pada masa jayanya, para *Kauw Puik* merupakan agen tunggal yang dapat berhubungan dengan pabrik, karena pihak pabrik tidak bersedia langsung mengadakan transaksi dengan pedagang besar atau pihak ketiga lainnya. Namun sistem ini berangsur berkurang sehingga dominasi *Kauw Puik* mulai menghilang.

Hampir seluruh pabrik karet remah terletak di ibukota propinsi, khusus untuk Kalimantan Tengah pabrik pengolahan yang terdekat terletak di Banjarmasin (PSE, 1998). Jarak yang jauh antara pabrik karet remah dan sumber bahan baku menyebabkan biaya transportasi cukup tinggi. Walaupun kini transportasi darat sudah lancar, namun jauhnya jarak tetap mempengaruhi besarnya biaya transportasi. Untuk wilayah Kalimantan,

transportasi sungai tetap merupakan salah satu pilihan pengangkutan bokr ke pabrik, terutama untuk bokr yang berasal dari daerah-daerah sepanjang sungai.

Keberadaan pedagang dalam sistem agribisnis karet rakyat memang sudah sangat mapan. Penggunaan pedagang untuk memasok kebutuhan pabrik pengolahan sudah berjalan sejak awal berkembangnya industri karet di Indonesia di akhir abad ke XIX, terutama di daerah Sumatera Bagian Selatan dan Kalimantan Barat. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk menggeser posisi pedagang, karena pemilik pabrik sangat berkepentingan dengan keberadaannya. Keterlambatan dan kekurangan pasokan bahan baku akan menimbulkan kerugian bagi pabrik karet remah. Terlebih lagi pasokan bokr secara langsung dari petani jumlahnya masih lebih kecil dari kapasitas terpasang, sehingga pabrik akan selalu berlomba mendapatkan bokr melalui pedagang perantara. Dengan berbagai cara, pabrik akan selalu berusaha merangkul dan mengikat para pedagang sebagai pemasok langganan. Seringkali hubungan tersebut menggunakan uang sebagai faktor perekat ikatan. Pihak pabrik menyediakan kebutuhan permodalan pedagang, dan sebagai imbalannya pedagang akan membayar dengan kesetiaan sebagai pemasok bokr.



Gambar 1. Sistem Pemasaran Bahan Olah Karet Rakyat

Hubungan seperti ini pada gilirannya juga dibina antara petani dengan pedagang perantara. Para pedagang bokr umumnya merupakan orang kaya di desanya. Petani menganggap bahwa pedagang adalah figur penolong, dan bukan sebagai orang yang merugikan mereka. Para pedagang selalu menjadi tumpuan harapan apabila petani mengalami kesulitan keuangan, karena tidak ada satupun lembaga keuangan pedesaan yang mampu menandingi efektivitas pedagang perantara

dalam menanggulangi kesulitan petani. Sebagai imbalannya petani akan selalu setia memasok kebutuhan karet pedagang, walaupun seringkali terdapat pilihan harga yang lebih baik. Hubungan ini akan berlangsung lebih erat, bila terjalin hubungan kekeluargaan antara petani dan pedagang.

Ketergantungan petani yang begitu besar kepada pedagang, menyebabkan petani tidak dapat bernegosiasi dengan memadai. Ketergantungan ini tampaknya akan terus berlanjut, karena kelompok tani tidak mampu bersaing dengan pedagang perantara dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik berupa uang tunai ataupun natura.

FAKTOR PENENTU KUALITAS BOKAR

Pilihan petani terhadap jenis bokar yang akan dihasilkan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu : (1) Jenis bokar yang diminta oleh pasar; (2) Harga dan insentif harga yang diberikan kepada bokar berkualitas lebih baik; (3) Taksiran penerimaan bersih yang akan diterima; dan (4) Biaya kesempatan (*opportunity costs*) yang harus dikorbankan dibandingkan dengan penerimaan yang akan diperoleh.

Jenis bokar yang banyak diminta oleh pasar adalah slab, karena pasar bokar berkualitas rendah tidak memiliki standarisasi harga yang dapat dijadikan patokan (PSE, 1998). Dalam proses penetapan harga, para petani selalu harus menerima tingkat harga yang ditetapkan, tanpa mempertimbangkan kualitas bokar yang dihasilkan. Persentase KKK yang selama ini dijadikan alasan penetapan harga bokar umumnya tidak dilakukan secara transparan. Kondisi demikian terus dipertahankan oleh pabrik karet remah dan pedagang bokar, untuk menjamin posisi mereka sebagai penentu harga dapat terus dipertahankan.

Harga jual bokar yang diterima oleh petani terkait erat dengan harga SIR FOB yang diekspor melalui pasar internasional (Sumana, 1992). Pada saat harga produk di pasar internasional meningkat karena kurangnya pasokan, tingkat harga yang diterima petani ikut naik meskipun dalam proporsi yang lebih kecil. Sebaliknya, jika harga di pasar internasional menurun, maka penurunan harga yang dialami petani akan jauh lebih besar.

Tidak adanya jaminan harga ini pada gilirannya tidak mampu merangsang petani untuk menghasilkan bokar dengan kualitas yang lebih baik, sit dan slab giling. Apalagi pabrik karet remah dan pedagang bokar tidak memberikan intensif harga terhadap produk bokar

dengan kualitas baik. Hal ini disebabkan banyaknya faktor-faktor yang tidak mampu dikendalikan oleh kedua lembaga ini dalam penetapan harga bokar. Limbong (1994) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga bokar di pasar dalam negeri adalah harga karet alam di pasar New York, persediaan (*stock*) karet alam Indonesia, nilai tukar petani karet, *trend* waktu, serta harga bokar di dalam negeri pada waktu-waktu sebelumnya. Dalam kaitan ini diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong kenaikan harga bokar di tingkat petani, khususnya bokar dengan kualitas yang lebih baik.

Tingkat harga yang secara proporsional lebih menarik diperlukan untuk bokar dengan kualitas yang lebih baik, agar penerimaan bersih yang diperoleh petani meningkat. Untuk mengetahui perbedaan penerimaan bersih berbagai jenis bokar yang dihasilkan petani, berikut ini akan disajikan hasil analisis pembelanjaan parsial (*partial budgeting analysis*). Analisis ini umumnya digunakan untuk menaksir perubahan biaya dan penerimaan kotor yang relatif kecil, sebagai akibat dari penggunaan teknologi baru (Dillon dan Hardaker, 1980). Pengertian teknologi baru disini adalah alternatif proses pengolahan yang dianjurkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk menghasilkan sit angin atau slab giling. Sedangkan teknologi pengolahan yang diterapkan oleh petani hanya menghasilkan slab.

Biaya produksi untuk menghasilkan sit angin dan slab giling ternyata lebih besar dibandingkan dengan slab biasa. Untuk menghasilkan kedua jenis alternatif bokar ini, petani harus mengeluarkan tambahan biaya sebesar Rp. 10.300,- atau 120 persen lebih tinggi untuk sit angin, dan Rp. 3.900,- atau 45 persen lebih tinggi untuk slab giling (PSE, 1998). Tambahan penerimaan kotor untuk sit angin adalah Rp. 12.000,- dan untuk slab giling sebesar Rp. 3.400,-. Dengan biaya produksi dan penerimaan kotor demikian, taksiran penerimaan bersih dari sit angin dan slab giling lebih rendah dibandingkan dengan slab biasa.

Lebih rendahnya penerimaan bersih dari sit angin dan slab giling disebabkan oleh tingginya biaya pengolahan dan tidak adanya insentif harga yang proporsional bagi bokar kualitas lebih baik. Dengan tingkat harga beli seperti yang ditetapkan saat ini, para petani niscaya tidak bersedia meningkatkan kualitas bokar yang dihasilkan. Untuk itu pemerintah perlu mengadakan pendekatan dengan pabrik karet remah, atau mengarahkan penggunaan bokar tersebut untuk bahan baku langsung dari berbagai industri di dalam negeri.

Insentif harga yang lebih menarik tampaknya merupakan faktor kunci keberhasilan program perbaikan kualitas bokar. Untuk mengorbankan tambahan waktu yang diperlukan dalam kegiatan pengolahan untuk menghasilkan sit angin dan slab giling, para petani biasanya membandingkan dengan penerimaan yang akan mereka lepaskan. Alternatif lain adalah dengan membayar tenaga upahan dalam pembuatan sit angin atau slab giling, asalkan insentif harga yang diberikan memungkinkan untuk itu.

UPAYA PERBAIKAN KUALITAS BOKAR

Untuk perbaikan kualitas bokar pada masa yang akan datang, strategi yang dapat ditempuh diarahkan pada empat aspek, yaitu: (1) Pengolahan secara bersama dan peningkatan skala ekonomi kelompok tani; (2) Pengembangan kebersamaan ekonomi; dan (3) Integrasi vertikal dalam agribisnis karet rakyat. Secara rinci keempat aspek tersebut akan dibahas berikut ini.

(1) Pengolahan secara Bersama

Kegiatan pengolahan bokar sampai saat ini masih dilakukan secara individual. Dengan pola ini petani melakukan sendiri pembuatan sit angin ataupun slab giling mulai dari pembekuan lateks, pencucian sampai ke penggilingan dan penjemuran. Untuk melakukan semua pekerjaan ini setiap petani harus mengorbankan waktu antara 5 - 6 jam setiap hari, meskipun lateks yang akan diolah hanya berkisar antara 10 - 15 kg.

Bagi petani, lamanya waktu pengolahan yang diperlukan tidak seimbang dengan keuntungan usahatani yang diperoleh, sehingga sebagian besar petani enggan untuk membuat sit angin atau slab giling. Faktor ini merupakan salah satu penyebab belum dimanfaatkannya sebagian besar UPH, serta pemanfaatan yang belum optimal pada UPH yang sudah beroperasi (PSE, 1998). Terlebih lagi para petani umumnya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memanfaatkan waktu yang luang, seperti menggarap kebun karet petani pemilik kebun luas dengan sistem bagi-hasil atau perusahaan tanaman pangan di lahan kering.

Untuk meningkatkan kualitas bokar petani, sebaiknya mekanisme pengolahan dikelola oleh kelompok tani untuk mencapai skala ekonomi dengan mempekerjakan 2 - 3 orang tenaga upahan untuk melakukan pengolahan lateks petani menjadi sit angin atau slab giling. Pekerja tersebut dapat berasal dari anggota kelompok tani ataupun tenaga non-anggota

kelompok. Spesialisasi dalam kegiatan pengolahan ini diharapkan mampu menghasilkan tenaga pengolah yang profesional, sehingga kualitas bokar dapat terus ditingkatkan. Dengan pola pengolahan yang demikian, diharapkan semua anggota kelompok tani bersedia untuk menyerahkan lateks ke UPH setiap hari sadap yang selanjutnya akan diolah, sesuai dengan keinginan dan kesepakatan produk bokar yang akan dihasilkan.

Untuk membayar tenaga pengolah dapat ditempuh melalui pola bagi hasil atau dalam bentuk pembayaran tunai. Pola bagi hasil dapat ditempuh dengan menetapkan tingkat persentase tertentu dari keuntungan bersih, setelah dipotong biaya pengolahan dan pemasaran. Sementara itu, untuk pembayaran dalam bentuk uang dilakukan dengan memperhitungkan korbanan waktu dan tingkat upah yang berlaku di pedesaan. Bila pola pengolahan bersama ini dapat dilaksanakan, maka pembayaran kepada tenaga pengolah dilakukan langsung oleh kelompok tani dalam jangka waktu tertentu misalnya setiap minggu, setiap bulan, dan sebagainya. Demikian pula untuk pembayaran hasil penjualan karet kepada petani.

Salah satu faktor penyebab tidak efisiennya pengolahan di tingkat petani adalah rendahnya produksi lateks yang dihasilkan setiap petani dan kelompok tani. Dalam keadaan ideal, produksi lateks setiap kelompok tani diharapkan tidak kurang dari 300 kg/hari, sehingga fasilitas pengolahan dapat bekerja sesuai dengan kapasitas terpasang. Namun dalam kenyataannya hanya sebagian kecil kelompok tani yang mampu menghasilkan lateks sekitar 75 persen dari tingkat produksi yang ideal, karena produktivitas karet yang dihasilkan petani umumnya rendah, luas pemilikan kebun terbatas, serta sedikitnya jumlah anggota kelompok tani (PSE, 1998). Dengan latar belakang demikian, semua fasilitas pengolahan yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk meningkatkan skala ekonomi fasilitas pengolahan, diperlukan pengembangan kelompok tani dengan menambah jumlah anggota dari petani karet yang ada di sekitarnya. Pengembangan ini bertujuan untuk mencapai tingkat optimalisasi dari produksi lateks yang siap diolah, sehingga petani yang akan dilibatkan sebagai anggota baru diharapkan bersedia untuk memanfaatkan fasilitas pengolahan. Tidak ada ketentuan jumlah minimum anggota kelompok tani, karena ukuran yang digunakan adalah jumlah produksi lateks setiap kelompok tani sehingga mencapai efisiensi ekonomi, sesuai dengan kapasitas terpasang fasilitas pengolahan.

Keuntungan yang diperoleh dari pola ini adalah terbukanya peluang untuk menjadikan kelompok tani sebagai unit agribisnis, serta mengembangkan tabungan kelompok tani. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa produk yang dihasilkan, yaitu sit angin atau slab giling, haruslah lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan produk tradisional petani berupa slab tebal atau ojol. Apapun bentuk program yang diterapkan bila tidak memberikan nilai keuntungan yang memadai tidak akan merangsang petani mengubah kebiasaan mereka. Untuk itu petani perlu diyakinkan bahwa keuntungan usahatani yang diperoleh setelah meningkatkan kualitas bokar lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Atas dasar itu, penetapan harga ditingkatkan petani haruslah diusahakan secara maksimal, sehingga petani menerima manfaat yang lebih besar.

Hal tersebut dapat diikuti langkah lain yang perlu dilakukan misalnya pemasaran bersama antar beberapa kelompok tani, sehingga jumlah bokar yang diangkat dapat lebih besar volumenya. Hal ini akan mengurangi biaya transportasi dan frekuensi penjualan dapat lebih cepat, sehingga petani tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menerima hasil penjualannya.

(2) Pengembangan Kebersamaan Ekonomi

Langkah peningkatan kualitas bokar dan kebersamaan di tingkat petani harus didahului pembenahan masalah internal kelompok tani. Pembenahan yang prospektif untuk dilakukan adalah mewujudkan kebersamaan ekonomi di dalam kelompok. Perwujudan sistem ini haruslah beranjak dari rasa kebersamaan masing-masing individu yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama. Dengan rasa kebersamaan ini, kelompok tani yang ada harus diubah menjadi kelompok produktif yang merupakan unit ekonomi terkecil. Secara bertahap kelompok produktif ini dapat diperbesar menjadi kerjasama antar kelompok, yang pada akhirnya dikembangkan lagi menjadi lembaga ekonomi kerakyatan.

Setiap tahapan pengembangan kelompok haruslah tetap dilandasi semangat kebersamaan dengan cara terus mengupayakan terwujudnya manajemen organisasi yang mandiri. Hal ini berarti bahwa organisasi mempunyai manajemen yang jelas dan transparan, serta selalu memperhatikan kebutuhan anggotanya secara dinamis. Perwujudan manajemen yang baik haruslah dilengkapi oleh peraturan internal berupa pembagian tugas yang proporsional serta

pembagian keuntungan. Dengan adanya aturan tersebut, para anggota merasa memiliki kebersamaan dan manfaat dalam kelompok tani.

(3) Integrasi Vertikal dalam Agribisnis Karet Rakyat

Struktur agribisnis karet yang bertumpu pada pengembangan karet rakyat seperti yang berlangsung di Indonesia dapat digolongkan dalam tipe *dispersal*. Struktur agribisnis ini dicirikan oleh tidak adanya hubungan fungsional antar pelaku agribisnis di setiap tingkatan (Simatupang, 1997). Hubungan yang terjadi bersifat tidak langsung dan impersonal, sehingga setiap pelaku agribisnis hanya memikirkan kepentingan sendiri tanpa menyadari adanya saling ketergantungan.

Pola hubungan yang demikian memperl lemah posisi petani karet dalam sistem agribisnis karet rakyat, meskipun berbagai program telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani. Contoh klasik dari lemahnya hubungan ini terlihat dari tidak adanya keinginan petani untuk memperbaiki kualitas bokar yang dihasilkan, meskipun secara terbatas telah diberikan insentif harga. Sebagai pemasok bahan baku, petani karet tidak memiliki informasi pasar yang lengkap dan kekuatan tawar-menawar dalam penetapan harga bokar, karena bentuk pasar bokar yang berlangsung selama ini bersifat monopsoni atau oligopsoni. Menurut Wharton (1962) informasi pasar yang seharusnya diperoleh petani produsen seringkali ditahan untuk dijadikan alat memperkuat posisi pelaku agribisnis hilir.

Untuk meningkatkan pendapatan petani karet melalui perbaikan kualitas bokar, diperlukan pola hubungan yang saling menguntungkan. Pola pengembangan agribisnis karet rakyat pada masa yang akan datang hendaknya dapat diintegrasikan secara vertikal dalam sistem agribisnis karet rakyat. Untuk berhasilnya pola ini, pelaku agribisnis karet yang terdiri atas petani, pedagang sarana produksi, KUD, pedagang bokar, dan pabrik karet remah; semestinya berhimpun dalam Unit Agribisnis Karet Rakyat (UAKR).

Dalam operasionalisasinya, fungsi-fungsi agribisnis dalam UAKR dilakukan oleh pelaku agribisnis yang manajemennya terpisah, namun memiliki strategi dan implementasi yang harmoni (Simatupang, 1995). Dengan pola ini pabrik karet remah berperan sebagai inisiator, motivator dan koordinator UAKR. Dalam pola ini, peran pemerintah hanya dibatasi dalam pembinaan dan penegak aturan main yang telah

disepakati, untuk mencegah praktek-praktek monopsonistik atau monopolistik yang mungkin akan terjadi.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dari berbagai uraian terdahulu, dapat diberikan beberapa kesimpulan dan implikasi kebijakan sebagai berikut :

1. Dalam menghadapi era perdagangan bebas yang berlangsung saat ini, produk karet olahan yang di ekspor harus memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dari negara pesaing utama. Untuk itu kualitas bokr yang dihasilkan petani perlu ditingkatkan.
2. Rendahnya kualitas bokr yang dihasilkan petani, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-ekonomi yang masih terus menghambat. Faktor-faktor tersebut antara lain : (a) Permintaan bahan baku dari industri karet remah yang tidak mendorong perbaikan kualitas bokr; (b) Dominasi pedagang yang sudah lama terbentuk dalam pemasaran bokr; dan (c) Belum berjalannya pola kemitraan yang saling menguntungkan antara pabrik karet remah dengan petani.
3. Dengan tingkat harga bokr yang berlaku saat ini, petani tidak tertarik untuk memperbaiki kualitas dengan membuat sit angin atau slab giling. Faktor kunci yang dapat mendorong perbaikan ke arah itu adalah pemberian insentif harga pada tingkat yang sesuai dengan kualitas produk secara proporsional atau teknologi pengolahan lain yang lebih murah.
4. Strategi yang dapat ditempuh untuk perbaikan kualitas bokr adalah : (a) Pengolahan secara bersama; (b) Peningkatan skala ekonomi kelompok tani; (c) Pengembangan kebersamaan ekonomi antar kelompok tani; (d) Integrasi vertikal dalam agribisnis karet rakyat dengan mengikut sertakan semua pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya dan (e) penciptaan alternatif pengolahan selain pabrik karet remah yang memerlukan bahan baku karet kualitas lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik (BPS). 1997. Statistik Indonesia 1996. BPS, Jakarta.
- Dillon, J.L. and J.B. Hardaker. 1980. *Farm Management Research for Small Farmer Development. FAO Agricultural Services*. Bulletin No. 41. FAO, Rome.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 1996. Statistik Perkebunan Indonesia 1995: Karet. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.
- Dove, M.R. 1988. Sistem Perladangan di Indonesia: Suatu Studi Kasus dari Kalimantan Barat. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Limbong, W.H. 1994. Keragaan Karet Alam Indonesia Ditinjau dari Jenis Pengusahaan dan Wilayah Produksi. Disertasi Program Pasca Sarjana, IPB, Bogor.
- Nancy, C. 1997. Peranan Komoditas Karet Alam dalam Mendukung Perekonomian Nasional selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama (1969 - 1993), hal. 441 - 455. *dalam* Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XLV, No. 3, 1997. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, FE-UI, Jakarta.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (PSE). 1998. Laporan Hasil Penelitian Kajian Agribisnis Karet Rakyat. Kerjasama PSE, dengan Dirjen Perkebunan, PSE. Bogor.
- Simatupang, Pantjar. 1995. Pengembangan Ekspor sebagai Pemacu Pertumbuhan Sektor Pertanian: *Pass Through* dan Koordinasi Vertikal sebagai Faktor Kunci. Makalah disampaikan dalam Temu Wicara Dampak Kaitan Kebelakang (*Backward Linkages*) Industri Pengolahan Ubikayu terhadap Besarnya Kesempatan Kerja, Pendapatan, Tenaga Kerja dan Nilai Tambah yang Tercipta dari Kegiatan Ekspor, Cipanas, 9 - 10 April 1995. Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, Departemen Keuangan, Jakarta.
- _____. 1997. Industrialisasi Pertanian sebagai Strategi Agribisnis dan Pembangunan Pertanian dalam Era Globalisasi, hal. 15 - 25 *dalam* Prosiding Industrialisasi, Rekayasa Sosial dan Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Sumana. 1992. Efisiensi Ekonomi Relatif Perusahaan Pengolah dalam Upaya Menampung Hasil Petani PIR Karet. Disertasi Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung.
- Wharton, C.R. 1962. Marketing, Merchandising and Money Lending: a Note on Middlemen Monopsony in Malaya, p. 24 - 44. *Malayan Economic Review*, 7 (2).
- World Bank. 1992. Market Outlook for Major Primary Commodities. Volume II: Agricultural Products, Fertilizers, and Tropical Timber. Report No. 814/92, World Bank, Washington D.C., USA.